

Kebijakan Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Ridho Afalda¹, Afrizal², Erwin³, Vonny Indah Mutiara⁴

¹ Universitas Andalas and ridhoafalda@gmail.com

² Universitas Andalas and afrizal@soc.unand.ac.id

³ Universitas Andalas and erwin_antro@yahoo.com

⁴ Universitas Andalas and mutiaravonny@agr.unand.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kondisi dan kebijakan pengetasan kemiskinan di Kabupaten Pelalawan tahun 2014-2023 dan kebijakan pengetasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang periode 2014 hingga 2023. Meskipun secara umum terjadi penurunan persentase kemiskinan, tren tersebut tidak sepenuhnya linier. Kenaikan pada tahun-tahun tertentu mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor, baik yang bersifat struktural seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, maupun situasional seperti dampak pandemi atau gejolak ekonomi nasional. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan pendapatan, tetapi berkaitan erat dengan aspek multidimensi lainnya. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengembangkan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada tiga fokus utama secara konvergen. Pertama, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, melalui penyediaan layanan dasar dan subsidi. Kedua, dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Ketiga, dengan menargetkan pengurangan kantong-kantong kemiskinan secara geografis agar intervensi menjadi lebih tepat sasaran. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga menyoar akar permasalahan kemiskinan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kebijakan Kemiskinan, Deskriptif Kualitatif, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the conditions and policies for poverty alleviation in Pelalawan Regency from 2014 to 2023 and the poverty alleviation policies implemented in Pelalawan Regency. The research method used is a quantitative descriptive method. The results of the study indicate that the poverty rate in Pelalawan Regency shows a fluctuating pattern throughout the period from 2014 to 2023. Although there has been a general decline in the poverty rate, the trend is not entirely linear. Increases in certain years reflect the influence of various factors, both structural, such as inequality in access to education and employment, and situational, such as the impact of the pandemic or national economic turmoil. This indicates that poverty is not merely an income issue but is closely related to other multidimensional aspects. The Pelalawan Regency Government has developed a poverty alleviation policy strategy focused on three convergent priorities. First, by reducing the financial burden on the community through the provision of basic services and subsidies. Second, by promoting income growth through economic empowerment and expanded employment opportunities. Third, by targeting the reduction of poverty pockets geographically to ensure interventions are more targeted. This strategy reflects a holistic approach that is not solely focused on numbers but also addresses the root causes of poverty at the local level.

Keywords: Poverty, Poverty Policy, Qualitative Descriptive, Pelalawan Regency, Riau Province

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan di Indonesia tentunya merupakan akumulasi dari kemiskinan di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Meskipun dilihat dari data, kondisi kemiskinan sudah

cenderung membaik, persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan masih banyak dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang sulit untuk dihilangkan (Farisa et al., 2023). Persoalan kemiskinan sering terjadi karena lingkungan yang tidak mendukung perubahan taraf hidup yang lebih baik (Lira, 2023). Seperti halnya dijelaskan oleh Sukardi (2021), terdapat hubungan yang erat dengan dimensi psikologis seperti ketidakmampuan, ketidakberdayaan untuk menyuarkan.

Salah satu daerah yang memiliki kontribusi PDRB yang tinggi terhadap Indonesia yaitu Provinsi Riau. Perekonomian Riau mengalami pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2023. Terlihat dari data triwulan II, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 4,88% atau meningkat dari 3,88% pada triwulan I 2023. Hal ini memperkuat posisi Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 4,81% terhadap PDB nasional.

Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 6,68% di mana angka ini berada di bawah angka kemiskinan rata-rata Indonesia, yaitu sebesar 9,36%. Akan tetapi jika dipertimbangkan kondisi daerah lain yang PDRB-nya di bawah Riau, justru angka kemiskinan Riau lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Riau pun menargetkan angka kemiskinan nol.

Salah satunya adalah di Kabupaten Pelalawan, salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s.d. 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km², yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan di antaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya, Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati oleh jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat.

Kondisi daerah yang strategis tentunya menjadi keuntungan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Pelalawan, akan tetapi kondisi ini sering menjadi paradoks, mengingat wilayah ini memiliki kekuatan fiskal dan dukungan ekonomi yang cukup. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pembangunan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal.

Peningkatan kondisi perekonomian yang lebih baik, tentunya Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pembangunan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang selama ini diimplementasikan, serta apakah strategi yang digunakan benar-benar menysasar akar persoalan kemiskinan. Menurut BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menjadi paradoks, mengingat wilayah ini memiliki kekuatan fiskal dan dukungan ekonomi yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pembangunan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang selama ini diimplementasikan, serta apakah strategi yang digunakan benar-benar menysasar akar persoalan kemiskinan.

Hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah bahwa kemiskinan merupakan dampak dari kehidupan yang dipenuhi oleh persaingan, di mana hanya individu atau kelompok yang kuat

yang mampu keluar dari jeratan kemiskinan (Ahmad, 2022). Dengan kata lain, mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya seperti modal, ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, serta informasi, cenderung lebih mampu bertahan dan meraih keberhasilan dalam persaingan tersebut.

Melihat kondisi daerah di Kabupaten Pelalawan menunjukkan keadaan PAD tinggi dan upaya pengentasan kemiskinan, angka kemiskinan masih fluktuatif. Kebijakan pengentasan kemiskinan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi hal menarik untuk dibahas dalam kajian ini agar mampu melihat lebih luas terkait penetapan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga perlunya penelitian ini untuk membahas terkait dengan:

1. Bagaimana kondisi kemiskinan absolut di Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pelalawan mengentaskan kemiskinan?

LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai situasi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, akses air bersih, lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup yang layak, perlindungan dari kekerasan atau ancaman, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, baik untuk perempuan maupun laki-laki (Fadilla, 2017).

Salah satu cara untuk mendefinisikan kemiskinan adalah sebagai situasi di mana seseorang atau sekelompok orang, termasuk perempuan dan anak-anak, tidak dapat mengorbankan hak-hak dasar mereka untuk menegakkan dan meningkatkan gaya hidup mereka yang saling menguntungkan (Erwin, 2022). Menurut Saputra (2021), kemiskinan muncul karena individu belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berperan sebagai pelaku ekonomi, sehingga tidak mampu berkontribusi dalam proses pembangunan. Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang dihadapi di berbagai daerah. Kemiskinan sering didasarkan pada kekurangan uang dan pendapatan per tahun yang biasa diaplikasikan sebagai pengukuran. Terdapat pendekatan yang umum terhadap pendefinisian kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif (Zastrow, 2000; Syaparuddi et al., 2015).

B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Menurut Suryahadi et al., (2010), strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dirumuskan melalui pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan ke dalam tiga klaster berdasarkan tujuan dan sasaran program-program tersebut. Klaster pertama adalah bantuan sosial, yang bertujuan memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kemiskinan dapat diatasi melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Komang et al., (2020) bahwa kesejahteraan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah dan tokoh adat, sehingga diperlukan partisipasi aktif untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Begitu jugademham Osei-Kufuor & Koomson, (2014) menjelaskan bahwasanya tingkat partisipasi penerima manfaat dalam intervensi penanggulangan kemiskinan dalam intervensi terkait penanggulangan kemiskinan pada umumnya tinggi dengan mayoritas penerima manfaat berpartisipasi dalam setidaknya satu tahap perencanaan kegiatan, sehingga dalam merumuskan suatu program penanggulangan kemiskinan sebaiknya dapat memenuhi potensinya dalam mengentaskan kemiskinan, perhatian harus lebih difokuskan pada pelatihan keterampilan berkala dan program peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Kebijakan yang kebanyakan dilakukan hingga saat ini ialah pemberian bantuan dana tunai kepada masyarakat miskin, yang mana dana yang diberikan tersebut belum mampu menciptakan atau mendorong peningkatan kualitas masyarakat untuk bisa berkembang lebih baik dan mampu mandiri (Saeed et al., 2020). Terkait kemiskinan melalui program dukungan pendapatan, di mana antara bantuan langsung tunai dan kemiskinan tidak ada hubungan yang signifikan antara bantuan tunai BISP dan kemiskinan, karena ketika menggunakan dataset lengkap dan hubungan negatif tetapi tidak signifikan secara ekonomi ketika hanya orang-orang dari kuintil konsumsi terbawah yang dipertimbangkan.

Menurut Ford (2009), kemiskinan membuat orang berisiko mengalami kekerasan traumatis dan tidak memiliki tempat tinggal yang stabil (tunawisma), yang memperparah risiko ini dan semakin meningkatkan kemungkinan mengembangkan PTSD. Terdapat kesepakatan umum bahwa mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan merupakan hal yang krusial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Bourguignon, 2004; Mlachila et al., 2017; Amponsah et al., 2023). Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar angka kemiskinan di suatu daerah, semakin sulit pula daerah tersebut untuk tumbuh secara ekonomi. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, di antaranya: pertama, karyawan pertanian memengaruhi tingkat kemiskinan. Kedua, luas rumah dengan akses air bersih (Lumbantoruan et al., 2023).

Berbagai negara didunia telah menerapkan berbagai Upaya dalam pengetasan kemiskinan, salah satu negara yang juga memiliki penduduk terbesar di dunia yaitu Tiongkok juga mengalami persoalan kemiskinan hingga menemukan model pengetasan kemiskinan pada tahun 2020 melalui pembangunan industri (PAID), sebuah komponen penting dari Proyek "*Five-pronged Poverty Alleviation Measures*", bertujuan untuk membangun kekuatan pendorong internal daerah-daerah miskin dan penduduk yang dilanda kemiskinan untuk mendorong pembangunan, yang sangat penting dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan (Liu et al. 2020;Liu & Zeng, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (dalam Waruwu et al., 2025), analisis kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Prosesnya bersifat induktif, dimulai dari data khusus menuju tema umum, melibatkan pengumpulan data di lokasi partisipan, serta interpretasi makna data mendalam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website BPS dan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk pengumpulan data melalui lembaga terkait yang menjelaskan kondisi kemiskinan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan dalam pengetasan kemiskinan sejauh ini. Melalui metode ini, akan tergambar (Purwanti, 2024), kondisi kemiskinan di Kabupaten Pelalawan dan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan

Pengukuran kemiskinan menurut BPS (2024) adalah garis kemiskinan, yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Semakin besar garis kemiskinan, maka akan semakin tinggi biaya atau pengeluaran di daerah tersebut. Sehingga apabila masyarakat tidak mampu memenuhi pengeluaran, tingkat keparahan kemiskinan.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2014 hingga 2024 terus mengalami peningkatan: pada tahun 2014 besaran garis kemiskinan sebesar Rp 438.949 meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp 689.786. Peningkatnya garis kemiskinan menggambarkan peningkatnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan agar berada di atas garis kemiskinan.

Tabel 1. Angka Garis Kemiskinan Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau

No	Tahun	Angka garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Kemiskinan (%)
1	2014	438.949	11,15
2	2015	451.528	12,09
3	2016	473.240	11,00
4	2017	487.648	10,25
5	2018	515.581	9,73
6	2019	534.078	9,62
7	2020	585.728	9,16
8	2021	618.738	9,63
9	2022	655.641	8,97
10	2023	689.786	8,15

Sumber: BPS Pelalawan (2024)

Tabel 1 menggambarkan perkembangan angka garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan selama periode 2014 hingga 2023. Selama satu dekade terakhir,

terjadi peningkatan garis kemiskinan secara konsisten, dari Rp438.949 pada tahun 2014 menjadi Rp689.786 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum untuk hidup layak, yang sejalan dengan laju inflasi dan perubahan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi, namun cenderung menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 11,15% dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 sebesar 12,09%. Setelah itu, angka tersebut terus menurun secara bertahap, dengan sedikit kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 9,63% akibat dampak pandemi COVID-19, sebelum akhirnya turun menjadi 8,15% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum, meskipun tantangan seperti ketimpangan, inflasi, dan pandemi sempat memperlambat laju penurunan kemiskinan.

Secara umum, data yang ditampilkan menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Meskipun garis kemiskinan terus meningkat setiap tahun, yang berarti bahwa biaya hidup dan kebutuhan minimum masyarakat semakin tinggi, persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan. Fenomena ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk mampu beradaptasi terhadap kenaikan biaya hidup, baik melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap bantuan sosial, maupun partisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi. Penurunan persentase kemiskinan di tengah meningkatnya garis kemiskinan dapat diartikan sebagai indikasi bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, mulai menunjukkan hasil yang efektif. Kebijakan-kebijakan tersebut kemungkinan mencakup intervensi seperti perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal yang berkontribusi pada pengurangan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, hasil ini mencerminkan keberhasilan relatif dari strategi pembangunan yang diterapkan, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terjangkau secara optimal.

Namun, dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan, persentase penduduk miskin justru berlawanan. Tidak selalu peningkatan garis kemiskinan diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan. Ini dapat dilihat pada tahun 2014 sampai tahun 2020, meskipun garis kemiskinan meningkat, persentase kemiskinan justru mengalami penurunan. Penjelasan yang dapat penulis berikan adalah bahwa peningkatan garis kemiskinan menggambarkan peningkatan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan agar berada di atas garis kemiskinan.

Seperti yang terlihat dalam Tabel 1, angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan yang cenderung berfluktuatif. Angka kemiskinan memang menurun dari tahun 2014 hingga 2023. Penyebab fluktuasi tersebut belum diketahui. Namun, naiknya angka kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun situasional. Hal ini menjadikan persoalan kemiskinan hal yang terus diatasi oleh pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Tambahan lagi yang menjadi persoalan adalah terdapat data kemiskinan ekstrem dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pelalawan, yaitu 1,81 persen kategori kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dengan perkiraan 2000 KK tergolong miskin ekstrem di Kabupaten Pelalawan. Penduduk yang termasuk miskin ekstrem adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem adalah garis kemiskinan internasional atau setara US\$ 1,9 PPP per hari.

Kemiskinan diartikan sebagai situasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, baik untuk perempuan maupun laki-laki (Fadilla, 2017; Saputra, 2021; Erwin, 2022; Hardiyanti et al., 2021; Mansur, 2024). Para ahli membedakan kemiskinan ke dalam dua jenis: kemiskinan absolut dan relatif (Zastrow, 2000; Syaparuddi et al., 2015). Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan (Suryawati, 2014). Menurut Pratiwi et al., (2022), dimensi kemiskinan merujuk pada kondisi kemiskinan yang timbul akibat terbatasnya akses terhadap peluang yang tersedia di masyarakat.

Kemiskinan dapat diatasi melalui berbagai faktor, di antaranya peningkatan kondisi pertumbuhan ekonomi (Sasmal et al., 2024). Standar dan tujuan kebijakan memiliki keterkaitan yang erat dengan sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan (Ardian & Purba, 2021). Seperti yang dinyatakan oleh Rakhmat & Firdaus (2019), Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan memiliki keunggulan strategis dalam menentukan tingkat angka kemiskinan. Berbagai program telah dikembangkan dan diimplementasikan, tetapi pelaksanaannya, tidak sedikit yang mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Pendistribusian bantuan sosial yang tepat sasaran (bias distribusi) menjadi isu utama yang perlu diselesaikan secepatnya dengan solusi terbaik. Sementara upaya pemerintah untuk menargetkan bantuan untuk program perlindungan sosial berdasarkan kriteria kemiskinan menunjukkan hasil yang cukup baik (Schnitzer, 2016 dalam (Botreau & Cohen, 2020).

B. Kebijakan Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan

Kebijakan Pengetasan Kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Adapun upaya utama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan ialah merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta terkait dengan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan pertama kali, yaitu validasi terkait data kemiskinan. Sehingga dengan adanya data tersebut, pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat merumuskan kebijakan terkait dengan pengetasan kemiskinan.

Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menanggulangi kemiskinan dilakukan dengan menyediakan barang publik yang memiliki manfaat langsung bagi kelompok masyarakat miskin. Barang publik dalam konteks ini merujuk pada fasilitas atau layanan dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa mengurangi manfaatnya bagi orang lain. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembangunan rumah layak huni, yang ditujukan khusus bagi warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Program pembangunan rumah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang paling rentan. Dengan menyediakan hunian yang layak, pemerintah tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan bermartabat. Hal ini tentu sangat penting karena kondisi tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas penduduk miskin.

Pelaksanaan program ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran kunci, yakni sebagai pelaksana teknis utama yang memastikan rumah dibangun sesuai standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi kualitas bangunan maupun kesesuaian lokasi. Melalui pendekatan ini, terlihat bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada bantuan tunai atau program ekonomi, tetapi juga memberi perhatian pada aspek infrastruktur dasar yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin. Penyediaan rumah layak huni menjadi simbol konkret dari kehadiran negara di tengah masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain itu, juga terdapat kebijakan yang bertujuan untuk mengadakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Di mana program yang diberikan yaitu pengembangan melalui pemberdayaan kepada perempuan rawan sosial ekonomi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan adanya pengadaan pupuk yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Aspek kesehatan dan pendidikan, pemerintah Kabupaten Pelalawan juga berdedikasi yang tinggi untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu sehingga membantu dalam biaya pendidikan serta kesehatan. Selain itu, adanya insentif kepada guru ngaji sehingga mensejahterakan guru ngaji yang berpengaruh kepada Pendidikan agama kepada anak – anak miskin.

Merujuk pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021 – 2026 yang merupakan dokumen yang berisi penjabaran visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, maka visi jangka panjang adalah terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang sejahtera, mandiri, inovatif, dan berdaya saing global berkelanjutan, dalam masyarakat inklusif yang beradab, beriman, bertakwa dengan mengembangkan nilai budaya Melayu tahun 2025. Keselarasan antara dokumen jangka panjang dan jangka menengah dilakukan untuk mengawal kebijakan pembangunan dalam memenuhi capaian target pembangunan.

Salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam RPJMD nya ialah mewujudkan masyarakat yang Sejahtera. Salah satunya adalah dengan menurunkan angka kemiskinan, di mana penetapan indikator Kinerja Utama Kabupaten Pelalawan dari indikator tingkat kemiskinan sebesar 6,5 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pelalawan saat ini tahun 2023 sebesar 8,15%. Sedangkan visi dan misi Bupati Pelalawan mengharapkan kemiskinan mencapai 6,5 persen. Hal ini tentunya masih jauh dari keadaan yang ada sekarang. Melihat perjalanan yang telah dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan semenjak tahun 2021 tentunya menjadi persoalan yang sangat penting untuk dibahas, terutama berkaitan dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tingginya angka kemiskinan di Pelalawan jika dibandingkan dengan daerah sekitar di Provinsi Riau menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai pemaparan dalam RPJMD Pelalawan (2024), permasalahan yang multidimensi, kemiskinan tidak bisa dilihat dari sudut pandang satu arah. Namun, beberapa fokus mampu menjadi satu benang merah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan namun memiliki bobot tinggi dalam pengentasan kemiskinan adalah pendidikan anggota rumah tangga, culture mindset, soft skill, dan paling penting adalah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Fokus tersebut akan mampu memutus rantai kemiskinan dengan cara mengembangkan sektor perekonomian yang memberikan multiplier effect bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan memberikan akses pangan secara baik

seperti mengupayakan food estate, pembangunan sektor perikanan, pembangunan pembibitan peternakan, memberikan akses pupuk gratis pada sektor perkebunan dan pertanian, pendirian pusat konveksi dan percetakan, memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin (RPJMD Pelalawan, 2024). Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi, diharapkan cara pandang dan cara berpikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.



Gambar 1. Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Pelalawan (2024)

Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang belum terwujud, beberapa permasalahan yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada, hingga pemerataan pembangunan daerah yang masih berpusat pada daerah perkotaan.

Selain itu, pemerintahan Kabupaten Pelalawan juga melakukan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui keputusan Bupati Pelalawan atau Kpts. 050/BAPPEDA/2023/331 tentang pemutakhiran data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem by name by address Kabupaten Pelalawan 2023-2024 yang mana hal tersebut merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sehingga berdasarkan keputusan bupati tersebut keluarlah surat edaran Nomor: 463.7/ BAPPEDA-EK/ 2023/98 tentang pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan miskin by name by address Kabupaten Pelalawan di mana kebijakan yang dilakukan berupa melakukan verifikasi dan validasi terkait data kemiskinan eksrem, di mana setiap program/kegiatan berupa bantuan melalui perangkat daerah (PD) untuk masyarakat diharuskan penerima individu/kelompok minimal 50% orang dengan kategori miskin. Adapun strategi kebijakan terhadap konvergensi program untuk percepatan penghapusan kemiskinan

melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, 2) peningkatan pendapatan masyarakat dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hingga saat ini, kajian terkait kemiskinan masih menjadi fenomena yang menarik diteliti oleh para ahli, sebagaimana dijelaskan oleh Amponsah et al., (2023) meskipun temuan-temuan empiris terus menginformasikan diskusi yang sedang berlangsung tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara berkembang, yang kompleks dan penuh perdebatan. Hal ini telah menghasilkan perdebatan sengit mengenai strategi yang efektif untuk mengatasi meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan yang meningkat di negara-negara berkembang.

Fenomena kemiskinan di Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan sudah dan sedang terjadi secara multiaspek atau multidimensional. Misalnya, pada salah satu kecamatan di Pangkalan Kerinci, terdapat beberapa keluarga yang tinggal di sebuah rumah yang tidak dialiri listrik, antara penghasilan dan pengeluaran tidak seimbang, tidak memiliki penghasilan tetap, sumber air yang tidak bersih, anak putus sekolah, belum sekolah, kurang gizi dan berisiko stunting, pengangguran usia produktif dan sebagainya. Berbagai upaya dalam pengetasan kemiskinan telah dilakukan tidak hanya oleh pemerintahan pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, yang memiliki program prioritas dalam hal pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial untuk yatim, janda tua, dan insentif untuk pengurus rumah ibadah. Namun, angka kemiskinan masih belum turun secara signifikan.

Persoalan yang ditemukan di Kabupaten Pelalawan terkait kemiskinan ialah pelaksanaan kebijakan belum tepat sasaran. Warga yang benar-benar sangat miskin dan layak dibantu sebagaimana indikator atau ketentuan yang berlaku, masih banyak belum tersentuh oleh kebijakan dan program pemerintah maupun pemerintah daerah. Misalnya, yang bersangkutan sudah mengusulkan kepada kelurahan, kemudian kelurahan meneruskan data ke kecamatan, setelah itu kecamatan meneruskan data ke Dinas Sosial, lalu berlabuh pada Kementerian Sosial. Namun, hasil atau output data yang dimasukkan ke dalam usulan tersebut yang bersifat bottom-up, tidak sesuai dengan usulan data terbaru. Melainkan yang menerima bantuan dari setiap program bansos masih berdasarkan data lama yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Kementerian.

Kondisi masyarakat yang beragam menjadi hal yang sulit diatasi dan sangat perlu berbagai kebijakan yang dipilih oleh pemerintah agar program yang dikembangkan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Menurut Ma'rif (2022), implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan mempunyai dampak, tingkat perubahan, dan penerimaan masyarakat miskin yang baik, meskipun masih ada oknum implementor yang kurang simpatik dalam menjalankan tugasnya. Tetapi Kim Chung et al., (2015) menjelaskan bahwa perencanaan harus diubah dalam tren desentralisasi ke tingkat komune dan mendorong partisipasi aktif penerima manfaat langsung dalam semua proses perumusan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program. Pemerintah daerah mengarahkan intervensinya pada upaya pemberdayaan masyarakat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Sementara itu, aspek kesehatan dan pendidikan menempati prioritas kedua bagi kedua jenjang pemerintahan tersebut (Marsitadewi & Sudemen, 2025).

Berbagai penelitian kemiskinan telah dilakukan sebelumnya, di antaranya dilakukan oleh Batana et al., (2013) yang menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di kalangan anak-anak 50% lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa dan hampir dua kali lipat lebih tinggi di kalangan lansia. Liu & Zeng (2022) menyarankan menerapkan strategi yang tepat dan memberikan

prioritas pada faktor pengembangan internal sirkulasi produk industri pertanian yang dapat mengurangi kemiskinan sesuai dengan kondisi lokal di berbagai daerah. Sehingga lebih mampu mencapai target pengentasan kemiskinan dan menawarkan wawasan untuk pengentasan kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu, penelitian terkait kondisi kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh Ferraro & Simorangkir (2020) menunjukkan bahwa kegiatan transfer uang tunai tidak tersebar di seluruh desa. Perlu dilakukan kontrol terhadap faktor-faktor pemicu yang memengaruhi partisipasi dan deforestasi di Indonesia.

Kebijakan pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anas et al., (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan didukung secara kuat oleh pemerintah daerah dan organisasi aparatur daerah terkait dengan memprioritaskan kolaborasi. Begitu juga, temuan menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan inklusif sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Langkah-langkah fiskal, dukungan bagi usaha kecil, dan reformasi ekonomi yang ditargetkan, seperti mikrofinansial dan redistribusi tanah, meningkatkan partisipasi ekonomi dan memberdayakan komunitas marjinal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola yang fluktuatif sepanjang periode 2014 hingga 2023. Meskipun secara umum terjadi penurunan persentase kemiskinan, tren tersebut tidak sepenuhnya linier. Kenaikan pada tahun-tahun tertentu mencerminkan adanya pengaruh dari berbagai faktor, baik yang bersifat struktural seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, maupun situasional seperti dampak pandemi atau gejolak ekonomi nasional. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan bukan semata persoalan pendapatan, tetapi berkaitan erat dengan aspek multidimensi lainnya.
2. Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengembangkan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada tiga fokus utama secara konvergen. Pertama, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, melalui penyediaan layanan dasar dan subsidi. Kedua, dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Ketiga, dengan menargetkan pengurangan kantong-kantong kemiskinan secara geografis agar intervensi menjadi lebih tepat sasaran. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga menysasar akar permasalahan kemiskinan di tingkat lokal.

REFERENSI

- Ahmad, B. (2022). Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan). *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), 1–17.
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 106415. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415>
- Anas, F., Zulkhah, S., & Sholikin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten

- Lamongan. *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 249–259.
- Ardian, M., & Purba, A. M. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Perspektif*, 10(2), 543–554. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4780>
- Arif Fadilla. (2017). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tangerang, Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Batana, Y., Bussolo, M., & Cockburn, J. (2013). Global extreme poverty rates for children, adults and the elderly. *Economics Letters*, 120(3), 405–407. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.006>
- Botreau, H., & Cohen, M. J. (2020). *Gender inequality and food insecurity: A dozen years after the food price crisis, rural women still bear the brunt of poverty and hunger* (hal. 53–117). <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2020.09.001>
- Erwin. (2022). *Pembangunan Dan Kemiskinan Pada Masyarakat Mentawai*. Andalas University Press.
- Farisa, P. F. R., Maharani, R. N., Maharani, N., Siswanto, T. N. A., Dwiastuti, W., Nurrachman, A., & Mulyadi, M. (2023). Kemiskinan Struktural Akibat dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 44–59. <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.232>
- Ferraro, P. J., & Simorangkir, R. (2020). Conditional cash transfers to alleviate poverty also reduced deforestation in Indonesia. *Sci. Adv*, 6, 1298–1310.
- Ford, J. D. (2009). Social, Cultural and Ethical Issues in the Traumatic Stress Field. In *Posttraumatic Stress Disorder* (hal. 313–347). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374462-3.00011-3>
- Hardiyanti, W., Kartika, A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Kemiskinan di Kota Besar Pulau Jawa. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 8(1), 92–103. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v8i1.6135>
- Komang, D., Gunartha, A., & Utama, S. (2020). Community Empowerment Strategy In Poverty Treatment. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(9), 332–344.
- Lira, M. A. (2023). Pengaruh Kemiskinan Struktural Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2485–2496. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3816>
- Liu, X., & Zeng, F. (2022). Poverty Reduction in China: Does the Agricultural Products Circulation Infrastructure Matter in Rural and Urban Areas? *Agriculture (Switzerland)*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/agriculture12081208>
- Lumbantoruan, J. F. A. K., Ohhyver, M., & Moniaga, J. V. (2023). Developing a Poverty Model in Papua using Geographically Weighted Regression. *Procedia Computer Science*, 227, 243–252. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.522>
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the Poverty Reduction Acceleration Policy in Karawang Regency, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715>
- Mansur, Y. (2024). Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 18–31. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.1930>
- Marsitadewi, K. E., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 9(1), 68–77.
- Osei-Kufuor, P., & Koomson, F. (2014). Reducing poverty through community participation: The case of the National Poverty Reduction Program in the Dangme-West district of Ghana. In *International Journal of Development and Sustainability* (Vol. 3, Nomor 8).
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.653>
- Rakhmat, R., & Firdaus, F. (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 33–38. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.11>
- Saeed, M., Kashif, H., Azmat, M., Saeed, M. K., & Hayat, M. A. (2020). *The Impact of Social Cash Transfers on Poverty in Pakistan-A Case Study of Benazir Income Support Programme*.
- Saputra, U. R. (2021). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Melalui Pengembangan Industri. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 22–36.
- Sasmal, B. R., Das, P., & Sasmal, J. (2024). Public Policy, Economic Growth and Poverty Alleviation: A Study in the Indian States. *Athens Journal of Business & Economics*, 10(3), 159–182. <https://doi.org/10.30958/ajbe.10-3-1>
- Sukardi, K. (2021). Analisis Kemiskinan Multidimensi Masyarakat Gorong-Gorong Kelurahan Kebun Sirih Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 62–79.

- Suryahadi Athia Yumna Umbu Reku Raya Deswanto Marbun, A. (2010). *Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia*.
- Suryawati. (2014). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. Alfabeta.
- Syaparuddi, Artis, S., & Nurhayani. (2015). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, 10(01), 261–274.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>